

BAB I**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan Hubungan Internasional kontemporer semakin menciptakan dunia yang terkoneksi. Perkembangan pesat dalam bidang arus informasi dan teknologi informasi memungkinkan kerja sama antar wilayah untuk dilakukan lebih cepat daripada sebelumnya. Batasan teritorial ataupun jarak semakin menjadi aspek irelevan dalam dinamika internasional. Kemudahan arus informasi dan perpindahan manusia mendorong para aktor Hubungan Internasional untuk terus mengembangkan kerja sama yang relevan terhadap kepentingannya. Negara selaku salah satu aktor besar dalam hubungan internasional mulai membuka dirinya dalam berbagai bentuk kerja sama. Hal ini membuka kemungkinan yang luas bagi komponen dalam negara untuk turut serta membangun daerahnya melalui pertukaran informasi antar negara yang kini memungkinkan berkat globalisasi.

Dunia yang semakin terkoneksi atau fenomena globalisasi mendorong aktor internasional untuk menciptakan jaringan yang kokoh dengan aktor lain. Willets (2001) dalam bukunya yang berjudul *Transnational Actors and International Organizations in Global Politics* menjelaskan bahwa aktor utama dalam diplomasi adalah Negara, tetapi diplomasi hanyalah sebagian kecil dari hubungan internasional. Jika bicara tentang hubungan internasional, maka Negara bukan lagi satu-satunya yang memiliki peran penting disana. Pelaku hubungan internasional terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu Negara dan non-negara. Aktor Negara adalah Negara, sedangkan pelaku non-negara terdiri dari perusahaan multinasional yang mendominasi perekonomian internasional dan juga NGO yang bekerja di bidang lingkungan dan organisasi antarpemerintah yang berperan aktif dalam politik internasional. Nyatanya, aktor non-negara mendominasi jauh lebih banyak daripada Negara. Bahkan organisasi dan kelompok ilegal seperti kartel narkoba dan kelompok teroris juga memiliki peran dalam hubungan internasional, dan dapat mempengaruhi kebijakan politik internasional suatu Negara (Willets, 2001). Dalam menjalankan fungsinya, Negara dan non-negara memiliki peran yang sama dan tidak dapat idatur secara individual. Meski pada awalnya hubungan internasional didominasi oleh para pelaku Negara, kini peran para aktor non-negara tidak bisa dianggap remeh, karena semakin lama cakupan hubungan internasional, maka akan semakin luas dan kompleks. Sehingga Negara tidak bisa sendirian lagi dalam mengelola semua itu.

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali potensi dalam industri pariwisata. Seperti kondisi alam yang dimiliki Indonesia dan letak geografisnya. Indonesia sendiri memiliki lebih dari 17.000 pulau. Hal ini merupakan daya tarik utama Indonesia dalam sektor pariwisata. Dengan teritorial yang luas, tentunya kekayaan budaya didalamnya juga luas dengan banyaknya penduduk yang mendiami berbagai pulau di Indonesia. Pariwisata sendiri merupakan salah satu sektor industri yang memiliki tujuan dan peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi negara. Saat ini perkembangan pariwisata mengalami peningkatan yang sangat pesat dan telah berhasil memberikan kontribusi besar bagi perekonomian dunia. Yang artinya, banyak negara menaruh sektor ini sebagai peran utama dalam meningkatkan perekonomian negaranya. Salah satu contohnya adalah Indonesia yang mana dalam beberapa tahun ini sedang berusaha dalam meningkatkan perannya dalam sektor pariwisata demi meningkatkan perekonomian Indonesia (Haryana, 2020). Peran sektor pariwisata dalam meningkatkan perekonomian negara dapat dinilai sangat penting, karena hal ini merupakan sumber devisa serta kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia yang juga pariwisata telah menjadi sektor yang sangat strategis dalam memperkuat perekonomian negara dan sekaligus menjadi unsur pemerataan pembangunan dari segi wilayah. Kemudian Pariwisata dipandang sebagai aktivitas dalam memberikan masyarakat dan pemerintah dampak ekonomi.

Pesona Indonesia atau *Wonderful Indonesia* merupakan program yang digadang oleh pemerintah pusat Indonesia dalam upaya meningkatkan turisme dan atensi dunia terhadap Indonesia. Dilansir dalam laman resminya, program yang dimulai pada tahun 2011 melalui Kementerian Pariwisata ini merupakan upaya lanjutan dari program *Visit Indonesia*. Program ini menarik untuk dijadikan konteks dalam penelitian ini karena tidak hanya mencakup aspek pariwisatanya saja. Konsep *country branding* menjadi fokus dari program Pesona Indonesia adalah kepribadian, jati diri, citra, nama baik, dan kepercayaan (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2017). Dengan demikian, konsep Pesona Indonesia tidak hanya terbatas pada pariwisata saja, melainkan konsep penciptaan citra secara keseluruhan. Oleh sebab itu, model diplomasi kultural, baik Indonesia maupun kota-kota yang ada di dalamnya, masuk ke dalam kerangka program Pesona Indonesia.

Lebih lanjut, kasus pariwisata ataupun pengembangan budaya suatu daerah seperti Wonderful Indonesia tidak hanya berada dalam ranah kultural, melainkan juga ekonomi. Pengembangan ekonomi berbasis kebudayaan atau *cultural economics* kemudian menjadi basis bahasan penting. Ekonomi kebudayaan sendiri membahas mengenai fenomena pengembangan kebudayaan dalam konteks ekonomi. Budaya di sini diartikan dalam arti luas yaitu kapital

sosial berupa kebudayaan benda dan tak benda, identitas masyarakat, hingga ideologi (Stretton, 1999). Dengan demikian, pengembangan budaya tidak hanya diartikan sebagai upaya preservasi kekayaan budaya semata, melainkan penggunaan kekayaan budaya sebagai kapital ekonomi. Pengembangan kapital budaya sebagai kapital ekonomi merupakan premis esensial dalam pengembangan citra dan pariwisata sebuah daerah.

Apabila secara khusus kemudian membicarakan mengenai aspek pariwisata dan pembentukan konsep *event* dalam pengembangan pariwisata lokal, menarik apabila melihat tulisan dari Putri (2012) yang membahas terkait bagaimana Tour de Singkarak dapat meningkatkan sektor pariwisata Indonesia sekaligus mempromosikan objek wisata yang khususnya berada di Sumatera Barat. Dan juga Tour de Singkarak secara tidak langsung dapat mencapai tujuan MDG's, salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan fasilitas umum. Dapat dikatakan bahwa Tour de Singkarak telah berhasil menjadi katalis pengembangan pariwisata di Sumatera Barat. Keberhasilan event ini pun tidak terlepas dari elemen-elemen *Stakeholder* dan masyarakat yang turut membantu suksesnya event ini. Aspek pariwisata di Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Hal ini ditandai dengan keragaman budaya dan adat istiadat yang dapat dijadikan nilai jual bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, keindahan alam Indonesia juga menjadi pesona tersendiri yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, apalagi jika potensi alam tersebut dikelola secara merata maka akan menghasilkan hasil yang maksimal. Pariwisata Indonesia tidak lepas dari pengaruh adat dan budaya masyarakat Indonesia. Keramahan masyarakat Indonesia yang selalu membuat wisatawan asing terkesan harus dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga menambah daya tarik pariwisata Indonesia.

Lebih lanjut lagi, Aida Rahma Suci dan Indra Pahlawan (2015) turut menyinggung soal pengembangan pariwisata lokal melalui upaya kerja sama internasional yang melibatkan berbagai pihak eksternal dengan judul “Dampak Tour de Singkarak terhadap Ekonomi Pariwisata di Indonesia (Studi Kasus: Provinsi Sumatera Barat)”. Dalam tulisan ini mereka menganalisis tentang pengaruh event Tour de Singkarak terhadap ekonomi pariwisata Sumatera Barat. Tour de Singkarak merupakan salah satu program kegiatan MICE dan program tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang bekerjasama dengan Pemprov Sumatera Barat. Mereka juga mengatakan bahwasannya promosi pariwisata yang dilakukan oleh Tour de Singkarak sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 telah berdampak positif terhadap sektor pariwisata di Sumatera

Barat, seperti peningkatan trafik wisata asing, pendapatan daerah, dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwasannya event Tour de Singkarak dapat menjadi alat diplomasi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian di daerah Sumatera Barat.

Di era globalisasi kini, negara-negara kini mengkaji kembali kebijakan ekonominya. Tidak hanya menyangkut soal kemakmuran masyarakatnya, isu perekonomian kini sangat penting mengingat kepentingan setiap aktor dalam hubungan internasional saling bersaing. Semakin hilangnya batasan territorial antar negara dan bangsa membuat upaya kerja sama, terutama dalam konteks ekonomi menjadi lebih deras melintas.

Tentu setiap negara memiliki cara masing-masing untuk mengantisipasi persaingan ekonomi yang semakin ketat dan bergantung pada interkoneksi dalam era globalisasi ini. Oleh sebab itu, keputusan pemerintah Indonesia beserta pemerintah daerah yang berada di bawah naungannya menjadi hal yang krusial. Keterlibatan pemerintah daerah sebagai sub sektor dalam hubungan internasional kini menjadi kian penting. Kini pemerintah daerah memiliki keleluasaan serta kewajiban yang besar dalam menciptakan program yang secara aktif dapat memanfaatkan peluang ekonomi, tidak hanya bagi daerah sekitarnya melainkan lebih jauh demi kesejahteraan nasional.

Pemerintah kota pada dasarnya memiliki peran besar dalam mensejahterakan masyarakatnya. Fenomena globalisasi membuka peluang bagi kota untuk bekerja sama, tidak hanya dalam taraf nasional melainkan internasional. Jaringan relasi dengan pihak di luar negaranya berarti pemerintah kota memiliki posibilitas luas untuk menggali informasi, pengalaman, hingga memfasilitasi pengembangan masyarakat. Oleh sebab itu, banyak pemerintah kota yang mengembangkan konsep kerja sama internasional. Hal ini berdasarkan fakta bahwa dunia semakin terkoneksi sebagai efek dari kemajuan teknologi persebaran informasi yang pesat akhir-akhir ini.

Penelitian ini kemudian bermaksud untuk menggali seberapa jauh sebenarnya Kota Padang menggunakan potensi ini untuk mengembangkan daerahnya. Keinginan pemerintah kota tentu adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini terus diupayakan melalui berbagai fasilitas dan hak yang diberikan oleh negara bagi pemerintah kota untuk beroperasi. Pendekatan *sister city* dan peluang kerja sama internasional antar kota merupakan salah satu upaya yang difasilitasi oleh negara bagi kotanya. Pemerintah Kota Padang memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjalin kerja sama dalam berbagai bidang terutama ekonomi, Pendidikan dan pariwisata untuk mengembangkan daerahnya. Oleh sebab itu, menarik untuk

melihat secara detil apa saja yang berjalan dalam pemerintah kota yang berusaha untuk melebarkan sayapnya dalam isu internasional dan bekerja sama dengan berbagai pihak eksternal.

Membahas secara spesifik peran dan kegiatan pemerintah kota dalam konstelasi internasional, Indonesia sendiri telah paham dengan konsekuensi globalisasi dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang memfasilitasi pemerintah daerah untuk melaksanakan kerja sama lintas negara dengan tingkat yang setara, tentu dengan catatan bahwa hal tersebut dilaksanakan demi mendukung stabilitas pemerintah pusat. Tingkatan yang setara di sini secara spesifik adalah kerja sama antar komponen *sub state* atau pemerintah daerah/kota/kabupaten di suatu negara.

Melihat Indonesia, seringkali pandangan tertuju pada area Jawa-Bali. Banyaknya penduduk, pusat pemerintahan, hingga perkembangan ekonomi di area Jawa-Bali memberi kesan bahwa diskursus mengenai perkembangan kota hanya berada di wilayah itu saja. Akan tetapi, ada kota lain, di luar konteks Jawa-Bali, yang juga menunjukkan perkembangan wilayahnya yaitu Kota Padang.

Kota Padang merupakan salah satu kota terbesar di Pulau Sumatra. Sebagai ibukota dari Sumatra Barat, Kota Padang memiliki jumlah penduduk terbesar di wilayahnya. Berlokasi di daerah pesisir pantai, kehidupan Kota Padang erat dengan laut. Pelabuhan strategis dan kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan sektor perikanan dan pariwisata merupakan salah satu kekuatan Kota Padang. Selain itu, Kota Padang memiliki kekayaan budaya yang tidak kalah terkenal seperti budaya Minangkabau dan masakan Padang. Potensi inilah yang kemudian dilihat sebagai basis pengembangan masyarakat Kota Padang, baik di sektor kelautan ataupun pariwisata demi mendukung perekonomian Kota Padang.

Berstatus sebagai ibukota Sumatra Barat, besar atensi pemerintah pusat terhadap daerah Kota Padang. Pengembangan Kota Padang salah satunya terlihat dari gagasan wilayah metropolitan Palapa yang mencakup Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman. Daerah ini diusung sebagai daerah metropolitan di Pulau Sumatra yang memprioritaskan sektor industri, perikanan, pariwisata, dan perdagangan dan jasa (Kementrian PUPR, t.t). Pengembangan wilayah metropolitan ditunjang dengan infrastuktur seperti Bandar Udara Internasional Minangkabau, Pelabuhan Teluk Bayur, revitalisasi Jalan Bypass Padang, dan Tol Padang-Sicincin.

Di sisi lain, Kota Padang memiliki inisiatif sendiri untuk mengembangkan daerahnya. Desentralisasi dan otonomi daerah memungkinkan Pemerintah Kota Padang untuk mengembangkan wilayahnya secara mandiri. Salah satu cara yang ditempuh adalah pengembangan jaringan di luar negeri. Keleluasaan kota untuk menggerakkan jaringan dengan kota luar negeri lain difasilitasi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 mengenai tata cara kerja sama daerah. Pada dasarnya, peraturan tersebut memberikan akses kepada kepala daerah untuk menjalin kerja sama dengan kepala daerah lain ataupun pihak ketiga. Hal ini dapat dilaksanakan selama ada rencana yang dapat diprakarsai secara efektif demi memajukan pelayanan publik.

Pengembangan dicapai dengan menjalin relasi dan menggerakkan jejaring dengan kota-kota di luar negeri dan juga dengan institusi internasional non negara. Kota Padang telah menjalin relasi dengan dua kota di luar negeri yaitu Fremantle di Australia dan Hildesheim di Jerman. Relasi Kota Padang dengan Freemantle didasari oleh fakta bahwa Freemantle juga merupakan kota Pelabuhan di daerah Pantai Barat Australia. Di sisi lain, kerja sama Kota Padang dengan Hildesheim merupakan salah satu yang paling lama, dimulai dari tahun 1988. Kolaborasi antar kota dilakukan di banyak sektor publik seperti sarana transportasi, drainase, air bersih, berbagai hal esensial yang berkuat mengenai tata kelola kota.

Selain itu, Kota Padang juga beberapa kali berhubungan dengan UNESCO dalam berbagai upaya untuk menjadikan nilai-nilai yang ada di Kota Padang lebih mendunia, baik kekayaan alam ataupun budayanya. Silo Gunung, masakan Padang, dan kebudayaan Minangkabau merupakan beberapa unsur kebudayaan yang diupayakan Kota Padang untuk mendapatkan pengakuan UNESCO demi mendorong citra Kota Padang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan dan fenomena yang ada, maka pertanyaan “Sejauh mana Pemerintah Kota Padang mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi menggunakan konsep Diplomasi Kota dalam konteks Wonderful Indonesia?” menjadi rumusan masalah yang tepat untuk mendalami fenomena ini.

1.3. Tujuan Penelitian

Mengeksplorasi upaya pengembangan pariwisata dan ekonomi Kota Padang yang menggunakan konsep Diplomasi Kota dalam konteks program Wonderful Indonesia.

1.4. Kerangka Teori

1.4.1 Definisi City Diplomacy

City Diplomacy atau Diplomasi Kota tergolong sebagai sebuah fenomena baru dalam Hubungan Internasional. Sebelum masuk ke dalam konsep Diplomasi Kota, perlu ditanamkan terlebih dahulu bahwasannya masing-masing kota memiliki rasa tanggung jawab terhadap warganya. Tanggung jawab tersebut dapat berarti menyediakan keamanan, kohesi sosial ataupun layanan kesehatan yang mumpuni. Pola pikir inilah yang menjadi dasar bagi kota untuk bergerak menjalin jaringan, tidak hanya dalam negaranya saja, melainkan juga dengan kota di luar negaranya (Sizoo dan Musch, dalam Musch et al., 2008). Pemerintahan kota merasa memiliki kapasitas lebih dalam menangani isu-isu spesifik di daerahnya ketimbang pemerintah pusat yang cenderung mengatasi isu makro. Keahlian dan pengetahuan mengenai daerahnya sendiri inilah yang kemudian mendorong kota untuk memperluas jaringannya, ke kota-kota lain di luar negaranya. Hal ini dilakukan dengan harapan suatu forum ataupun suatu kerja sama dapat tercipta dengan badan yang juga memiliki permasalahan dan kondisi yang serupa.

Dalam upaya membedah konsep Diplomasi Kota, Sizoo dan Musch (dalam Musch et al., 2008) dapat dikatakan bahwa Diplomasi Kota itu sendiri masih menjadi konsep yang cair dan banyak interpretasi yang berkembang. Akan tetapi secara umum, dapat dikatakan bahwa pembedahan Diplomasi Kota dapat dibagi menjadi dua. Pertama, Diplomasi Kota merupakan proses *networking* kota-kota di dunia demi mencapai tujuan seperti keamanan, stabilitas kesehatan dan imigrasi. Dengan demikian, pandangan ini menitikberatkan kota sebagai aktor yang aktif menggerakkan kerja sama dan forum di taraf internasional. Kedua, pandangan yang menitikberatkan pada jaringan yang telah dibangun oleh kota-kota itu sendiri. Pandangan kedua ini lebih menganggap organisasi yang telah dibangun oleh kota bukan hanya wadah forum, melainkan aktor yang dapat berdampak signifikan di dunia internasional.

Terlepas dari dua diskursus dalam pembahasan Diplomasi Kota, perlu ditekankan beberapa unsur yang terlihat secara umum di kedua belah proposisi. Pertama, urbanisasi dan pemadatan penduduk di kota-kota besar yang tersebar di berbagai penjuru dunia menjustifikasi pentingnya peran kota dalam peta politik internasional. Kedua, upaya *bottom-up* merupakan pendekatan yang penting dalam mengkaji isu-isu urban yang kini semakin penting. Ketiga, kohesi sosial, keamanan, perdamaian, layanan kesehatan, prevensi dan penyelesaian konflik

menjadi fokus tujuan dari upaya-upaya Diplomasi Kota (Sizoo dan Musch, dalam Musch et al., 2008). Tiga unsur inti di atas menunjukkan bahwa Diplomasi Kota menekankan pada meningkatnya peran kota dalam isu global. Dengan meningkatnya penduduk dan aktivitas ekonomi di daerah perkotaan, tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota dapat mempengaruhi peta politik dan stabilitas di skala global.

Berangkat dari landasan berpikir di atas, terbentuklah berbagai kerja sama seperti *sister city* dan forum internasional yang berisikan kota-kota di dunia. Bentuk kerja sama dan interaksi dalam forum inilah yang kemudian disebut sebagai Diplomasi Kota. *Network* atau jaringan menjadi konsep yang sering disebutkan dalam tulisan Lecavalier dan Gordon (2020). Jaringan antar kota yang kemudian bermanifestasi dalam forum bertaraf internasional dianggap sebagai cara bagi badan kota untuk meningkatkan *awareness* mengenai signifikansi kota. Seperti yang sudah dibahas di paragraf sebelumnya, agenda yang dibawa umumnya adalah peran kota yang semakin besar, terutama kota-kota yang memegang sentra bisnis, penduduk terpadat, atau bahkan kota yang sedang mengalami krisis dan konflik merupakan badan-badan yang memerlukan atensi dunia internasional.

Selain terlihat dalam bentuk forum bertaraf internasional, *sister city* atau konsep *twinning cities* juga menjadi metode populer bagi kota untuk menjalin jaringan. Metode *twinning cities* membangun relasi antar kota di negara yang berbeda dengan tujuan pertukaran informasi dan pengalaman mengenai pengelolaan daerah (McGlory, 2018 dalam Lecavalier dan Gordon, 2020). Metode *twinning cities* menjadi operasionalisasi Diplomasi Kota yang dapat menyediakan wadah pertukaran ide mengenai tata kelola, manajemen budaya, dan kohesi sosial di antara dua kota di negara yang berbeda. Berpijak pada *twinning city*, terdapat dua kelebihan yang dapat dirasakan kota. Pertama, pengalaman dan ide mengenai tata kelola kota dari kota di negara lain dapat membantu memberikan udara segar bagi kebijakan di taraf lokal. Mempelajari langsung manajemen daerah dari kota lain dapat mempercepat perbaikan dan pembangunan struktur yang lebih baik menggunakan pengalaman dari kota-kota lain. Kedua, *twinning city* menjadi awal mula bagi kota-kota untuk berjejaring, menciptakan jaringan relasinya sendiri dengan kepentingan politik yang minim dari pemerintah pusat negara asalnya.

1.4.3 Tolok Ukur Kesuksesan City Diplomacy

Setelah menciptakan kerjasama bilateral dalam bentuk *twinning cities* dan forum internasional seperti U20 dan C40, tentu muncul pertanyaan mengenai efektivitas dari kerja

sama antar kota kontemporer ini. Untuk menjadikan konsep Diplomasi Kota sebagai landasan penelitian ini, perlu ditilik juga sejauh mana diplomasi ini dapat menghasilkan dampak positif terhadap kota-kota yang berpartisipasi ataupun kepada dunia secara umum.

Salah satu temuan yang menarik apabila membicarakan mengenai jaringan yang dibentuk oleh kota berasal dari tulisan Abdullah dan Garcia-Chueca (2020). Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa konsep kekuatan atau *power* negara dan kota memiliki sumber yang berbeda. Di satu sisi, *power* suatu negara berlandaskan kedaulatannya atau kekuasaan atas daerah wilayahnya. Di sisi lain, *power* yang dimiliki oleh kota sebagai aktor aktif di dunia internasional adalah kerja sama, jaringan yang telah dibangun dengan kota-kota lain. Dengan demikian, perbedaan dinamika kerja sama kota jauh berbeda dengan negara. Hal ini penting untuk menggambarkan potensi kesuksesan yang dapat dicapai oleh kota dan jaringan yang telah dibentuk.

Dengan sifat *power* dari Diplomasi Kota yang berlandaskan jaringan relasi, maka kekuatan unik yang dimiliki Diplomasi Kota ialah meyakinkan dan memimpin jaringan yang telah terbentuk menuju tujuan spesifik yang diinginkan. Kekuatan jaringan yang ada menempatkan kota sebagai aktor yang tidak saja mempengaruhi kebijakan global, melainkan ikut terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan global (Abdullah dan Garcia-Chueca, 2020). Indikator kesuksesan pertama dari Diplomasi Kota kemudian dapat dilihat dalam besarnya pengaruh suatu kota terhadap partisipan ataupun pemimpin dari suatu forum antar kota. Pengaruh salah satu kota yang dominan dalam forum dapat membawa kota partisipan lainnya untuk turut serta menyetujui dan mengimplementasikan kebijakan yang telah disetujui dalam forum. Pengaruh inilah yang menjadi salah satu titik berat Diplomasi Kota. Terlebih ketika jaringan ini bergerak melewati batasan birokrasi dan kepentingan politik negara.

Dalam lingkup pengembangan aspek ekonomi, Polonsky (2011) menekankan bahwa sebagian besar kegiatan ekonomi dipicu oleh proses pemasaran yang menawarkan peluang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dan akan dihargai jika (1) mampu menciptakan manfaat berkelanjutan dari sumber daya lingkungan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa mengorbankan kemampuan masa depan yang dibutuhkan oleh generasi kedepan; (2) tidak hanya sebatas mampu memasarkan dan menjual jasa, tetapi juga harus mampu memasarkan dan menjual solusi perjalanan dan lingkungan yang berkualitas secara keseluruhan.

Menggunakan pengaruh dan kekompakan dalam forum kota, Diplomasi Kota menyuguhkan bentuk baru penyelesaian masalah global. Diplomasi Kota bergerak melewati kepentingan politik negara yang seringkali menyabotase kerja sama internasional, menghambat kecepatan aksi, bahkan menggagalkan kerja sama seluruhnya. Dinamika politik dan ideologi yang berdampak buruk terhadap kerja sama merupakan hal yang tidak dapat ditolerir dalam penanganan isu global, terutama isu seperti kesehatan, pemanasan global, permasalahan imigrasi, hingga penyelesaian konflik di daerah-daerah urban. Di sinilah Diplomasi Kota dapat berperan lebih sigap dan lebih tegas dalam menciptakan resolusi kerja sama yang dapat disetujui oleh forum (Abdullah dan Garcia-Chueca, 2020). Kesuksesan Diplomasi Kota yang kedua terlihat dari seberapa cepat dan tanggap forum kota beraliansi dan membentuk solusi terhadap isu, baik mendesak ataupun tidak, yang sedang menjadi kegelisahan bersama. Kecepatan dan solidaritas dalam forum tidak terlepas dari bentuk hubungan dalam Diplomasi Kota yang tidak berlandaskan pada kedaulatan, otonomi, melainkan kepada relasi yang telah dibangun.

1.4.3 Budaya dalam Diplomasi

Penggunaan *soft power* di era ini sangat bisa diandalkan, karena aktor-aktor yang berperan tidak lagi hanya negara dalam politik global, tetapi ada aktor-aktor yang berperan tidak lagi hanya negara dalam politik global, tetapi ada aktor-aktor baru lainnya yang bermunculan. Dengan demikian, dalam *soft power*, kekuasaan menjadi lebih persuasif daripada koersif. Satu konsep *power* bergeser dimana pada awalnya penggunaan *hard power* jauh lebih banyak digunakan dibandingkan *soft power*. Diplomasi yang digunakan dalam *soft power* disebut sebagai diplomasi baru karena kegiatan diplomasi tidak seperti biasanya. Salah satu bagian dari diplomasi baru tersebut adalah diplomasi budaya. Dalam diplomasi budaya berarti suatu pemerintah akan memberdayakan budaya negara, karena dalam hal ini budaya menjadi identitas negara yang akan menjadi alat dalam kegiatan diplomasi. Dengan itu, hasil diplomasi budaya secara implisit akan mempromosikan budaya negaranya sendiri dan membangun citra negara di negara lain.

Diplomasi merupakan instrumen yang tepat untuk digunakan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan suatu kepentingan. Termasuk praktik diplomasi publik yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan nasional di bidang pariwisata. Diplomasi yang semula hanya menjadi instrumen dan medium politik luar negeri di ranah Hubungan Internasional, kini

berkembang dengan memperluas cakupan isu, pemahaman dan aktor-aktor yang terlibat dalam praktik diplomatik (Aksoy dan Cicek, 2018). Dalam konteks diplomasi, budaya seringkali digunakan sebagai penunjang dalam penyelenggaraan diplomasi yang disebut juga dengan diplomasi budaya. Diplomasi budaya dapat membentuk citra suatu negara sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan negara terhadap prestasi dan potensi negaranya yang pada akhirnya akan mempengaruhi kepentingan nasional di berbagai bidang, seperti ekonomi dan lain sebagainya. Diplomasi budaya merupakan sarana yang efektif bagi negara karena memiliki akses yang mudah dan dapat dikenali oleh banyak orang sehingga dapat diapresiasi. Penyebaran nilai, adat, gagasan dan lain sebagainya melalui diplomasi budaya memudahkan negara untuk menentukan apa yang dianggap penting atau efisien secara strategis untuk mewakili dirinya di luar negeri. Upaya ini juga bertujuan untuk merealisasikan sejauh mana suatu negara berusaha memperdagangkan budayanya dengan dunia internasional.

1.5. Hipotesis

Kota Padang melakukan diplomasi melalui kerja sama *sister city* dan jaringan relasi dengan UNESCO. Kedua upaya ini bertujuan untuk memajukan sektor pariwisata dan perekonomian Kota Padang. Apabila melihat perkembangan Kota Padang dalam beberapa tahun terakhir, diplomasi kota telah berhasil mengembangkan aspek pariwisata, kebudayaan, dan pengembangan sumber daya manusia yang berdampak pada perekonomian Kota Padang

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian akan membahas mengenai upaya pengembangan pariwisata dan ekonomi di Kota Padang. Penelitian fokus membahas upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota, terutama upaya Diplomasi Kota yang berhubungan dengan pihak eksternal di luar lingkup negara. Selain itu, lingkup penelitian yang diambil adalah awal mula program Wonderful Indonesia yaitu pada tahun 2011.

1.7. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena dapat memberikan landasan logika penelitian yang analitik, melihat teori yang berkembang dan menggunakan teori tersebut dalam melihat fenomena yang diteliti. Rumusan masalah dan pembuktian hipotesis menjadi fokus utama dari penelitian ini. Dengan demikian, data-data yang dicari dan nantinya didapatkan digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

Berawal dari pertanyaan “bagaimana”, penulis menggunakan tipe penelitian eksplanatif untuk mengulas topik ini. Dengan menggunakan tipe eksplanatif, penelitian diharapkan dapat menghasilkan suatu penjelasan atau penyebab terjadinya fenomena yang diteliti (Levy, 2002). Penelitian ini tidak bertujuan untuk menciptakan teori baru ataupun membandingkan beberapa teori sekaligus. Rumusan masalah dan pembuktian hipotesis menjadi fokus utama dari penelitian ini. Dengan demikian, data-data yang dicari dan nantinya didapatkan digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Data yang terkumpul nantinya berfokus untuk menjawab upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam mengembangkan ekonomi dan pariwisatanya melalui konsep diplomasi kota.

1.8. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data dari sumber sekunder. Hal tersebut berarti data yang didapat berasal dari jurnal ilmiah, buku, artikel kredibel, dokumen resmi pemerintah, dan sejumlah sumber internet lain yang memuat informasi relevan. Data yang diambil, baik data mentah maupun landasan teori bertujuan untuk membuktikan argumentasi yang sudah Penulis jabarkan.

1.9. Sistematika Pembahasan

Penelitian akan dibagi menjadi lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan, termasuk di dalamnya latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis, dan metodologi penelitian. Bab kedua akan menjabarkan upaya diplomasi *sister city* Kota Padang. Bab ketiga akan membahas mengenai upaya pembangunan relasi dengan UNESCO oleh Kota Padang. Bab keempat yaitu kesimpulan, akan membahas mengenai efektivitas Diplomasi Kota yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Kota Padang dengan melihat fakta di lapangan menggunakan kerangka teori yang telah dibangun.